

LAPORAN UJI PETIK Triwulan I (Januari – Maret 2019)

I. PENDAHULUAN

Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan program KOTAKU adalah keberhasilan pelaksanaan pengendalian proses kegiatan di lapangan. Salah satu instrument pengendalian program adalah melalui kegiatan Uji Petik yang dilakukan secara periodic dan terencana terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

OSP 9 Sulawesi Barat memiliki 2 kabupaten dampingan yaitu kabupaten Majene dan Polewali Mandar yang terdiri dari 17 kelurahan dengan kategori 8 kelurahan pencegahan dan 9 peningkatan. Hingga tahun 2018, pelaksanaan program KOTAKU berupa kegiatan BDI di 9 kelurahan dan peningkatan kapasitas masyarakat berupa pelatihan (PKM) di 17 kelurahan. Meskipun secara umum kegiatan telah terlaksana dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tentunya masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan tujuan program tidak tercapai sesuai target. Untuk itu diperlukan upaya pengendalian program dimana yang pada gilirannya akan dapat memotret keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan sebuah kegiatan sehingga diperoleh pembelajaran (best practice) dan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Di tahun 2019, OSP 9 Sulawesi Barat mendapatkan alokasi dana BPM sebesar 5.5 Milyar yang diperuntukkan bagi 4 kelurahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar seperti yang tertera pada table berikut :

No	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Alokasi BPM (Rp)	Keterangan
1	Polewali Mandar	Polewali	Manding	1.000.000.000	Flag 1
			Polewali	1.500.000.000	Flag 2
			Sulewatang	1.000.000.000	Flag 2
			Darma	2.000.000.000	Flag 2
	Total			5.500.000.000	

Selain dana BPM di 4 kelurahan tersebut juga mendapatkan dana peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) dengan masing-masing kelurahan sebesar Rp 10.000.000,- yang pelaksanaannya di tahun 2019 ini juga.

Tujuan

Pelaksanaan Uji Petik Triwulan I (Januari-Maret 2019) difokuskan di Kabupaten Polewali Mandar terkhusus pada kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2018. Hal ini dilakukan mengingat kegiatan BPM 2019 akan dilaksanakan di kabupaten ini sehingga kekurangan dalam hal pendampingan yang selama ini dilakukan dapat diminimalisir dan kualitas pendampingan dapat lebih ditingkatkan.

Sasaran dari uji petik ini meliputi Pemda / Pokja Kabupaten dan BKM (masyarakat). Meskipun materi uji petik tidak dilakukan ke keseluruhan instrument yang ada namun beberapa hal yang menjadi focus utama yang krusial untuk dilakukan saat ini antara lain :

1. Mengetahui keterlibatan Pemda / Pokja PKP Kabupaten dalam program
2. Mengukur capaian pelaksanaan PKM tahun 2018
3. Mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaan BDI 2018
4. Mengetahui perkembangan pemeliharaan kegiatan oleh KPP
5. Mengetahui proses pendampingan kolaborasi (Kabupaten dan kelurahan)
6. Memastikan validasi data kegiatan infrastruktur di lapangan

Jadwal Pelaksanaan Uji petik

Adapun jadwal uji petik Triwulan I tahun 2019 yang telah disusun adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Obyek uji petik	Lokasi	Keterangan
1	19 Maret 2019	Pemda/Pokja	Kantor Balitbangren Kab. Polewali Mandar	Termasuk perjalanan dari Kab. Mamuju ke Kab. Polewali Mandar
2	20 Maret 2019	BKM/Kelurahan	Kel. Manding dan Wattang	
3	21 Maret 2019	BKM/Kelurahan	Kel. Polewali	

II. HASIL UJI PETIK TRIWULAN I (JANUARI – MARET 2019)

Berdasarkan hasil pelaksanaan uji petik yang dilakukan di tingkat Pemda/Pokja dan masyarakat maka dihasilkan beberapa catatan lapangan / temuan sebagai berikut :

No	Obyek Uji Petik	Catatan lapangan/temuan	Penyebab	Rekomendasi
1	Pemda/Pokja	<p>Positif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten (Bupati) - Koordinasi antar anggota Pokja relative lancar. - BOP Pokja telah tersedia meskipun tidak dalam alokasi dana khusus pokja. <p>Negatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki jadwal pertemuan rutin - Belum melakukan monitoring secara rutin - Dokumentasi hasil monitoring belum dilakukan secara mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesibukan rutin masing-masing anggota Pokja. - Tim korkot masih dominan dalam hal pelaporan kegiatan Pokja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim korkot melakukan pendampingan Pemda/Pokja dalam penyusunan agenda rutin pertemuan dan jadwal monitoring. - Penguatan kepada Pokja dalam hal pelaporan hasil kegiatan sehingga dapat dilakukan secara mandiri oleh Pokja sebagai bahan laporan kepada Pemda setempat
2	Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat (PKM)	<p>Positif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan kegiatan persiapan sebelum pelaksanaan. - Materi pelatihan sesuai kebutuhan. - Materi pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan. - Pelatihan telah dilaksanakan sesuai koridor yang ada. <p>Negatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan proposal masih didominasi oleh fasilitator. - Tidak dilakukan evaluasi pemandu pada akhir sesi pelatihan. - Peserta belum semuanya memahami materi yang disampaikan pemandu 	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia belum memahami teknik penyusunan proposal (ketergantungan terhadap fasilitator masih tinggi). - Pemandu belum memahami pentingnya evaluasi pada akhir sesi pelatihan. - Kemampuan Teknik fasilitasi pemandu belum memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan terhadap panitia pelaksana pelatihan sehingga mampu menyusun proposal secara mandiri. - Dilakukan evaluasi pemandu setiap akhir sesi pelatihan guna perbaikan kekurangan selama proses pelatihan. - Peningkatan kapasitas pemandu khususnya Teknik fasilitasi.

3	Pemeliharaan kegiatan (KPP)	<p>Positif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil kegiatan masih relative baik dan dimanfaatkan warga. - Telah terbentuk tim KPP. <p>Negatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - KPP belum memiliki rencana kerja pemeliharaan yang jelas dan terukur. - Sumber pendanaan belum real (swadaya spontanitas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan KPP pasca kegiatan relative masih minim. 	<p>Tim faskel lebih proaktif dalam mendampingi KPP pasca kegiatan yang meliputi penguatan kelembagaan dan penggalangan sumber dana pemeliharaan dengan perencanaan yang jelas dan realistis.</p>
4	Kinerja kolaborasi	<p>Positif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah tersedia dukungan data yang menjadi kebutuhan pengurangan kumuh. - Adanya dukungan dari Pemda setempat. - Telah terdapat kegiatan kolaborasi di wilayah dampingan <p>Negatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKM belum memiliki kemampuan menyusun proposal kolaborasi. - Terbatasnya sumber kolaborasi (pihak swasta). - Forum BKM belum berperan secara aktif dalam proses pemasaran program (kolaborasi). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan terhadap forum BKM terkait pemasaran program belum optimal. - Ketergantungan terhadap fasilitator dalam penyusunan proposal kolaborasi masih tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan dan motivasi BKM untuk memiliki kemampuan menyusun proposal kolaborasi. - Pengaktifan kembali forum BKM dalam rangka pemasaran program (kolaborasi).